

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, H.R., 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jilid 2, Restu Agung, Jakarta.
- Alfitra, S. H, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2017 *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2013 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Ketiga. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana : Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hiariej, Eddy O.S. 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Khaleed, Badriyah, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Lamintang dalam Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mappesona, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Pustaka, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, H, 2020, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,: Alfabeta, Bandung

Sunarso, H. S. 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Widiartana, G., & Wisnubroto, A, 2021, *Menuju Hukum Acara Pidana Baru*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Yanto, O, 2020, *Negara hukum: kepastan, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta.

Jurnal

Ardellia Luckyta Putri Armunanto, “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana,” *Jurnal Analogi Hukum* (12 Mei 2020), hlm. 146. <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.143-147>

Capra, D. J., & Berch, J. (2022). “Evidence Circuit Splits, and What to Do About Them.” *UC Davis Law Review*, 56, 1203–1268.

Douglass, J. G. (1999). “Balancing Hearsay and Criminal Discovery.” *Fordham Law Review*, 68(6), 2097–2140. <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol68/iss6/2>

Febrina Hertika Rani, Ismail Pettanasse, Rd. Muhammad Ikhsan, dan Samsul, “Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan yang Mengalami Kekerasan Berulang,” *Jurnal Legalita*, Vol. 6, No. 2 (2024): 114

Faturohman, F., Vira, M. A., & Alia, S. R. (2023). Peran Korban dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia. *Borobudur Law and Society Review*. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/11024>

Hotman Sitorus, “Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana,” *Jurnal Yure Humano (2017)*”, hlm. 72 <https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/yurehumano/article/view/67>

Johari, “Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* (November 2020), hlm. 123 <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>

Kamila, F., Yanuar, I., & Nurdiansyah, R. (2022). "Implementation of Solving Criminal Cases (Splittings) in the Proof Process in Criminal Trials". *Jurnal Ruang Hukum*, 1(1), 23–26. (30 Juni 2022) <https://doi.org/10.58222/juruh.v1i1.262>

Khoiriyah, L. (2015). “Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian.” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 110–123. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/download/398/348>

Laia, Fariaman.”*Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia*”. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), pp.24-39. (25 Februari 2022) <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i1.443>

- Muharikin, I. M. (2015). "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *CORE*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/294926453.pdf>
- Maulida Prima Saktia, "Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010," *Verstek: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3 (2013): 45.
- Ni Made Eka Pramita Suari dan I Made Mahardika Widyantara, Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. (2020).
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2213>
- Putra, Muhammad Johan Aria, Firman Freaddy Busroh, and Marsudi Utoyo. "Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1.3 (2023): 135-152.
- Respati Bayu Kristanto dan Hervina Puspitosari, Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby), *Unes Law Review*, 2024,
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Rompas, Chrisitian. "*Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian.*" *Lex Privatum*, vol. 4, no. 2, (11 Februari 2016)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11358>
- Sabirin, S. (2021). "Pemecahan Berkas Perkara dan Relevansinya dengan Asas Peradilan Cepat." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91–104. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/5067/3199>
- Sabirin, Sabirin. "*Pemecahan Berkas Perkara dan Relevansinya dengan Asas Peradilan Cepat dalam Perspektif Keadilan.*" *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.2 (2021): 459-482. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.5067>
- Sagala, K. C. P. (2020). "Akibat Hukum Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas." *Jurnal Dilmiltama*.
https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/Koneksitas_Babinkum%20TNI.pdf
- Santoso, B. (2020). Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Verstek*.
<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/941>
- Saragih, Christina Mahdalena, et al. "*Analisis Hukum Terhadap Penggabungan Dan Pemisahan Perkara Pidana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.*" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3.2 (2020): 360-368. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.309>

Sitorus, C. N. T. (2017). "Analisis Yuridis Putusan dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *UNEJ Repository*.
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/100023/>

Syarimah, Nor, and Santi Rima Melati. "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya." *Jurnal Global Ilmiah* 2.2 (25 November 2024): 901-906
<https://doi.org/10.55324/jgi.v2i2.139>

Tyler, Tom R. (2003). "Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law." *Crime and Justice*, 30, 283–357. <https://doi.org/10.1086/652233>

Waskitara, Wisnu. "Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian," *Jurnal Ilmu Hukum - Ejournal Untag Samarinda*. Vol 8, No 1. (2022) 286-299 <https://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/6269/5810>

Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1.1 (2015).

Skripsi dan Tesis

Gisman, "Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian," Tesis, Universitas Muslim Indonesia.

Ira Replubina Lubis, "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)" 2018, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tata Angelia, *The Dispute Settlement Mechanism for Bullying Cases in High School Procedures in Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, 2023,

Ulfiana, Uun, YA Triana Ohoiwutun, and Samuel Saut Martua Samosir "Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana." *Repository UGM*.

Wawan Mardiansyah, "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan (Studi Pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan)" 2019, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Internet

Febrian, Elwindhi, "Splitsing Perkara Ferdy Sambo dan Penggabungan Dakwaan yang Pernah Dibatalkan," *Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt635b4f09221b0/splitsing-perkara-ferdy-sambo-dan-penggabungan-dakwaan-yang-pernah-dibatalkan/> diakses 28 November 2024.

Federal Rules of Evidence. (2019). *Rule 804. Hearsay Exceptions – Declarant Unavailable*. Legal Information Institute.
https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_804

- Hukumonline, “Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana-lt5394538dd600b/> diakses 2 Desember 2024.
- Hukumonline, “Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidikan dan di Pengadilan.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2/> diakses 20 Januari 2025.
- Hukumonline, “Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*).” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemisahan-berkas-perkara-pidana-isplitsing-i-lt588275023a37c/> diakses 15 Februari 2025.
- Hukumonline, “Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/isplitsingi-memungkinkan-pelanggaran-azas-hukum-hol18013/> diakses 19 November 2024.
- ICJR, “Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara”. <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/> diakses 1 Juli 2025
- Kumparan, “Perbedaan Antara Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Perkara Pidana.” <https://kumparan.com/berita-terkini/perbedaan-antara-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-perkara-pidana-234JsNRHRbH> diakses 12 Maret 2025.
- Margaretha, “Dinamika Psikologi Korban dan Saksi dalam Memberikan Kesaksian Peradilan atas Trauma atau Trauma karena Peradilan.” <https://psikologiforensik.com/2022/12/22/dinamika-psikologi-korban-dan-saksi-dalam-memberikan-kesaksian-peradilan-atas-trauma-atau-trauma-karena-peradilan/> diakses 12 Maret 2025.
- Pengadilan Negeri Lhoksukon, Rahmat Aries.SB, “Pembuktian Pidana.” https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran diakses 12 Maret 2025.
- Pengadilan Negeri Tanah Grogot, “Perbedaan Antara Barang Bukti dan Alat Bukti.” <https://web.pn-tanahgrogot.go.id/2024/01/26/perbedaan-antara-barang-bukti-dan-alat-bukti-2/> diakses 12 Maret 2025.
- RMOL.id, Eddy O.S. Hiariej, “Pakar UGM: Perlu Reformasi Hukum Acara Pidana Demi Perlindungan HAM dan Transparansi Proses Hukum,” <https://rmol.id/hukum/read/2025/01/23/653501/pakar-ugm-perlu-reformasi-hukum-acara-pidana-demi-perlindungan-ham-dan-transparansi-proses-hukum/> diakses 4 Februari 2025.
- Saputra, A. (2023). *Beginning Criminal Evidence in Indonesia and the Common Law System*. Academia.edu. <https://www.academia.edu/download/111737933/>
- UMSU, “Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti.” <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti/> diakses 12 Maret 2025.

UNODC. (2008). *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 800/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby.